



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

Anggota parlemen ASEAN menyerukan pembebasan para pembela hak asasi manusia di Kamboja

JAKARTA, 8 Agustus 2016 – Anggota parlemen dari seluruh Asia Tenggara hari ini menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat dari lima pembela hak asasi manusia (HRD) yang saat ini ditahan dan menghadapi tuduhan di Kamboja.

Bergabung dengan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil nasional, regional, dan internasional untuk meluncurkan tekanan baru untuk mengamankan kebebasan mereka, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mengutuk pemenjaraan yang sedang berlangsung atas tuduhan yang dibuat-buat kepada anggota Komisi Pemilihan Umum/*National Election Commission* (NEC) dan empat staf dari Asosiasi Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Kamboja/*Cambodian Human Rights and Development Association* (ADHOC), sebuah LSM nasional terkemuka. Anggota parlemen menyerukan diakhirinya pelecehan peradilan mereka dan menggalang dukungan dari masyarakat internasional untuk membela lima pembela HAM tersebut yang kini telah menghabiskan lebih dari 100 hari dalam penahanan pra-sidang.

"Kita harus tegas dalam dukungan kami untuk pembebasan mereka. Tidak ada yang boleh dikenakan penangkapan sewenang-wenang atau pemenjaraan, dan anggota masyarakat sipil tidak boleh ditempatkan pada risiko karena melakukan pekerjaan mereka," kata Ketua APHR Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia.

"Tuduhan dalam hal ini adalah jelas bermotif politik dan telah lebih merusak aturan hukum yang sudah lemah di Kamboja. Pihak berwenang harus membebaskan lima pembela HAM jika mereka berharap untuk memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kredibilitas mereka di mata internasional."

Empat anggota staf ADHOC - Ny Sokha, Yi Soksan, Nay Vanda, dan Lim Mony - ditangkap pada tanggal 28 April, bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal NEC Ny Chakrya, dan baru dikenai tuntutan empat hari kemudian atas dugaan menyuap saksi dalam kasus yang sedang berlangsung terhadap wakil Pemimpin Oposisi Kem Sokha. Awal banding awal mereka untuk jaminan ditolak pada tanggal 13 Juni, dan mereka menghadapi sepuluh tahun penjara jika terbukti bersalah.

"Pemerintah Kamboja membuat olok-olok terhadap hukum dengan mengupayakan kriminalisasi terhadap individu-individu tersebut," kata Santiago. "Adalah hal yang sangat keterlaluan dalam menempatkan pekerja LSM diadili karena telah menyediakan bantuan hukum yang sah untuk warga yang membutuhkan dan hal ini telah diperburuk oleh fakta bahwa pengadilan jelas digunakan oleh pemerintah untuk mengejar agenda politik."

Pemenjaraan lima pembela HAM telah datang dalam konteks situasi politik di Kamboja yang semakin memusuhi masyarakat sipil. Pada tahun lalu, telah nampak peningkatan tajam dalam pelecehan, intimidasi, dan serangan terhadap oposisi dan suara independen, bersama dengan lonjakan jumlah tahanan politik yang ditahan di Kamboja. Tanggal 10 Juli terjadi pembunuhan terhadap komentator politik terkemuka Kem Ley, hal ini menimbulkan kekhawatiran tambahan tentang keamanan masyarakat sipil.

"Kami telah menyaksikan serangan habis-habisan terhadap masyarakat sipil di Kamboja," kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR RI. "Ini harus diakhiri. Pihak berwenang memiliki tugas untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil - termasuk yang kritis terhadap pemerintah memiliki ruang untuk beraktivitas secara bebas dari penganiayaan dan intimidasi "

"Untuk lima orang yang tetap di penjara yang melanggar hak-hak dasar mereka: ketahuilah bahwa kita tidak lupa Anda dan kami berdiri dengan Anda dalam solidaritas," kata anggota Majelis Nasional Kamboja Mu Sochua.

"Kami akan terus menyerukan pembebasan Anda dan mendorong maju menuju masa depan untuk Kamboja di mana hak asasi manusia dilindungi dan kehendak rakyat dihormati."